

TESIS

**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN
SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI
PEMODERASI**

***THE EFFECT OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
AND INFORMATION SYSTEMS ON FINANCIAL REPORT
QUALITY WITH ORGANIZATIONAL CULTURE AS A
MODERATOR***

INAYATI

A062222037



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN
SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI
PEMODERASI**

***THE EFFECT OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
AND INFORMATION SYSTEMS ON FINANCIAL REPORT
QUALITY WITH ORGANIZATIONAL CULTURE AS A
MODERATOR***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

INAYATI

A062222037



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

disusun dan diajukan oleh

INAYATI
A062222037

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 25 Juli 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196406091992031003



Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196410121989101001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Inayati
NIM : A062222037
Jurusan/Program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2024

Yang Membuat Pernyataan


Inayati

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si.,CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA. Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian studi;
4. Prof. Dr. Arifuddin, SE.,Ak., M.Si.,CA dan Dr. Amiruddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi- diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.
5. Dr. R.A. Damayanti, SE.,Ak., M.Soc.,Sc.,CA, Prof. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.CA dan Dr. Rahmawati H.SE.,Ak.,MSi.,CA selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya BPSDM atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan izin untuk menempuh pendidikan;
8. Suami tercinta Umar Arjuna serta anak-anak tersayang Nisa, Khansa, Shanum dan Tama yang selalu sabar serta mendoakan penulis dalam

menyelesaikan studi ini, *I love you all*;

9. Teman-teman Magister Super Spesialis Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2 Tati, Evelyn, Fitri, Wahyu, Vandy dan Niswar yang selalu kompak dan memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan hingga selesainya masa studi;
10. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2024

Peneliti

ABSTRAK

INAYATI. *Pengaruh Good Government Governance dan Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi* (dibimbing oleh Arifuddin dan Amiruddin).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh *good government governance* dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 150 satuan kerja dengan pemilihan sampel menggunakan rumus slovin. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good government governance* dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi dapat memperkuat pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi dapat memperkuat pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: *good government governance*, sistem informasi, kualitas laporan keuangan, budaya organisasi



ABSTRACT

INAYATI. *The Effect of Good Government Governance and Information Systems on Financial Report Quality with Organizational Culture as a Moderator* (supervised by Arifuddin and Amiruddin)

This study aims to examine and analyze the effect of good government governance and information systems on the quality of financial reports with organizational culture as a moderating variable. The research was conducted at Work Units within the Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Work and Public Housing. The respondents participating in this study consisted of 150 work units, with the sample selection using the Slovin formula. The statistical methods used to test the hypotheses were multiple regression analysis and moderation regression analysis. The results of the study indicate that good government governance and information systems have a positive effect on the quality of financial reports. Organizational culture can strengthen the effect of good government governance on the quality of financial reports. Organizational culture can also strengthen the effect of information systems on the quality of financial reports.

Keywords: good government governance, information systems, financial report quality, organizational culture



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Ruang lingkup penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1 <i>Goal Setting Theory</i>	12
2.1.2 Kualitas laporan keuangan	13
2.1.3 <i>Good Government Governance</i>	15
2.1.4 Sistem Informasi	18
2.1.5 Budaya Organisasi	29
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	36
3.1 Kerangka Konseptual	36
3.2 Hipotesis Penelitian	37
3.2.1 Pengaruh <i>Good Government Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	38
3.2.2 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	39
3.2.3 Budaya Organisasi memoderasi <i>Good Government Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan.....	39
3.2.4 Budaya Organisasi Memoderasi Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	40
BAB IV METODE PENELITIAN	42
4.1 Jenis Penelitian	42
4.2 Populasi dan Sampel.....	42
4.2.1 Populasi	42
4.2.2 Sampel	42
4.3 Teknik Pengumpulan data	44
4.3.1 Data Primer	44
4.3.2 Data Sekunder	44
4.4 Metode Pengumpulan data.....	44

4.5	Operasionalisasi Variabel	45
4.6	Metode Analisis Data	46
4.6.1	Pengujian Kualitas Data	47
4.6.2	Pengujian Asumsi Klasik	48
4.6.3	Pengujian Hipotesis	49
BAB V	HASIL PENELITIAN	51
5.1	Deskripsi Data	51
5.1.1	Gambaran Umum Responden	51
5.1.2	Karakteristik Responden Penelitian	52
5.1.3	Statistik Deskriptif	53
5.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	59
5.2.1	Uji Validitas	59
5.2.2	Uji Reliabilitas	61
5.3	Uji Asumsi Klasik	61
5.3.1	Uji Normalitas	62
5.3.2	Uji Multikolonieritas	64
5.3.3	Uji Heterokedastisitas	65
5.3.4	Uji Autokorelasi	66
5.4	Uji Hipotesis	66
5.4.1	Analisis Regresi Data Penelitian	66
5.4.2	Analisis Regresi Moderasi (Multiple Regression Analysis)	69
BAB VI	PEMBAHASAN	73
6.1	Pengaruh <i>good government gover</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	73
6.2	Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .	74
6.3	Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Good Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	75
6.4	Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	76
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	78
7.1	Kesimpulan	78
7.2	Implikasi	79
7.3	Keterbatasan	80
7.4	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

1.1 Data Laporan Keuangan	1
1.2 Perkembangan Laporan Hasil Kementerian PUPR.....	4
2.1 Hasi Penelitian Terdahulu	30
4.1 Operasional Variabel	45
5.1 Tingka Pengembalian Kuesioner	51
5.2 Deskripsi Responden Penelitian	52
5.3 Rekapitulasi Jawaban Variabel <i>Good Government Governance</i>	53
5.4 Rekapitulasi Jawaban Variabel Sistem Informasi.....	55
5.5 Rekapitulasi Jawaban Variabel Laporan Keuangan	56
5.6. Rekapitulasi <i>Jawaban</i> Variabel Budaya Organisasi	57
5.7 Hasil Uji Validitas	60
5.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	61
5.9 Hasil Uji Normalitas.....	62
5.10 Hasil Uji Multikolonieritas	64
5.11 Hasil Autokorelasi	66
5.12 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	67
5.13 Hasil Uji Summary	68
5.14 Hasil Uji T	69
5.15 Hasil Analaisis Regresi Moderasi.....	70
5.16 <i>Uji Summary</i> Moderasi.....	71
5.17 Hasil uji T	71
5.18 Ringkasan Hasil Penelitian.....	72

DAFTAR GAMBAR

2.1	Modul pada SAKTI.....	24
5.1	Hasil Uji Normalitas.....	63
5.2	Hasil Uji Heterokedastisitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah merupakan entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan harus dapat mengelolah anggaran dengan baik agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, transparansi dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan didalam UUD 1945 untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan negara. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah menunjukkan bagaimana posisi keuangan secara terstruktur yang dapat menunjukkan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan informasi keuangan yang berkualitas. Untuk memperoleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas maka laporan keuangan harus memenuhi

karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71, 2010)

Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan memberikan informasi sesuai waktu yang tepat, informatif, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintah sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang berkualitas dalam pengambilan Keputusan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik serta meminimalkan risiko dalam pengambilan Keputusan (Sabrina & Zuhri, 2023). Laporan keuangan bukan hanya menyajikan laporan keuangan yang relevan tetapi laporan keuangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan bagi suatu entitas pelaporan untuk menghindari penyalahgunaan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak berkualitas atau buruk dapat menciptakan peluang munculnya penyimpangan dan kekeliruan dibidang keuangan yang dapat berakibat menimbulkan kecurangan, korupsi dan kolusi sehingga dapat terjadi tuntutan hukum. Goal setting theory memiliki hubungan yang erat dengan kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan teori ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kualitas informasi keuangan, kinerja keuangan, dan tata kelola perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi sifat atau karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan artinya dalam penyusunan laporan keuangan memberikan informasi dapat digunakan dalam pengambilan Keputusan dengan memperhatikan kendala yang terjadi sehingga kesalahan dalam informasi pada laporan keuangan dapat dihindari. Andal dapat diartikan laporan keuangan berisi informasi yang tidak

menyesatkan. Informasi ini memiliki syarat penyajian yang jujur mengenai segala transaksi yang sesuai, *verifiability* atau dapat diuji oleh beberapa pihak yang menghasilkan hasil yang hampir sama, syarat lainnya yaitu netral yang artinya informasi diperuntukkan untuk umum dan tidak memihak pada pihak tertentu. Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan berisi informasi yang lebih dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Laporan keuangan dapat dibandingkan tiap periodenya harus sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan yang berkualitas jika informasi yang ada di dalamnya telah sesuai dengan norma-norma serta karakteristik kualitatif laporan keuangan (Fattah, dkk (2023)

Laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada publik memiliki beberapa permasalahan sehingga menimbulkan keraguan kepada publik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh BPK yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi masih memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa Kementerian/Lembaga. Berikut ini adalah data laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017-2022.

Tabel 1.1 Data Laporan Keuangan

Opini	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	80	82	85	85	84	82
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	6	4	2	2	4	1
TMP (Tidak Memberi Pendapat)	2	1	1	-	-	-
TW (Tidak Wajar)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	87	88	87	88	83

Sumber : LHP LKPP BPK RI 2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 selain memberikan opini BPK juga mengungkapkan sejumlah 3.490 temuan yang menghasilkan 10.218 rekomendasi yang terdiri dari 5.266 permasalahan dengan nilai Rp. 25,85 triliun yang meliputi 24,6% permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 41,9% merupakan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta 33,5% merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Basuki Hadimulyo selaku Menteri PUPR, opini WTP adalah suatu bentuk pertanggungjawaban Kementerian PUPR atas penggunaan anggaran negara. Kementerian PUPR berupaya mempertahankan opini WTP pada Laporan Keuangan dengan cara meningkatkan tata Kelola penggunaan anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Sementara itu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Perkembangan Laporan Hasil Kementerian PUPR

Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL						
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Kementrerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LHP LKPP BPK RI 2023

Berdasarkan Tabel 1.2. Pada Tahun 2015 Kementerian PUPR mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hal ini dipengaruhi adanya perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015. Dalam laporan keuangan

semester pertama dan kedua tahun 2018 Kementerian PUPR hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sebanyak 33 temuan masuk dalam laporan keuangan BPK 2018. Namun, ada 5 (lima) temuan utama yang menyebabkan Kementerian PUPR mendapatkan opini WDP dari BPK yaitu penatausahaan persediaan di beberapa satuan kerja, tata Kelola aset yang tidak ditemukan wujud dan buktinya, kelebihan bayar dan kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang serta penyesuaian realisasi keuangan dengan kemajuan fisik rill lapangan.

Kementerian PUPR tahun 2022 memperoleh opini WTP namun masih ada temuan berulang hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR antara lain penganggaran dan pengklasifikasian belanja barang dan modal belum tepat, adanya PNBPN terlambat/belum disetor ke kas negara atau kurang/tidak adanya penyimpangan terkait masalah transpor perjalanan dinas yang tidak didukung bukti *at cost*, permasalahan pengelolaan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, pembukuan bendahara belum tertib antara lain bendahara pengeluaran tidak membuat buku pembantu pajak dan tidak melakukan pemeriksaan kas pada bendahara pengeluaran, pengelolaan kas tunai bendahara pengeluaran melebihi ketentuan, pencatatan dan pelaporan aset belum memadai.

Penyebab dari temuan berulang terhadap hasil pemeriksaan BPKP di atas adalah adanya perubahan struktur organisasi, kurangnya koordinasi dengan pihak luar Kementerian PUPR seperti pihak donor, Kementerian Keuangan terkait proses *refund* pada pemeriksaan laporan keuangan, Kementerian PUPR belum dapat berkoordinasi secara optimal dengan pihak penyedia yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau melakukan setoran. Kementerian PUPR sebagai kementerian yang berperan dalam Pembangunan nasional selalu

berupaya untuk mempertahankan opini WTP dan berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur TI dan keamanan internal dan tindakan pengendalian dan hubungannya dengan laporan keuangan, yaitu untuk tujuan memastikan kualitas laporan dan menghindari keterlambatan pelaporan serta meminimalkan kesalahan dalam isi dan angka yang disajikan. Untuk mencapai hal tersebut manajer harus menerapkan strategi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan, penerapan sistem informasi akuntansi merupakan salah satu strategi yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan (Putra, dkk. 2022).

Budaya organisasi terdiri nilai-nilai, norma-norma dan perilaku dalam suatu organisasi yang memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana prinsip-prinsip *good government governance* diterapkan dalam organisasi sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas dan integritas yang terwujud dalam budaya organisasi dapat menjadi landasan yang kuat dalam penerapan *good government governance* dalam penyusunan laporan keuangan. Budaya organisasi juga dapat mengoptimalkan manfaat sistem informasi yang memadai sehingga dapat meningkatkan akurasi, relevansi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga diperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang dikembangkan sejak tahun 2015, yang digunakan oleh unit-

unit di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai uji coba. SAKTI yang digunakan tahun 2022 adalah penggabungan dari aplikasi yang telah ada sebelumnya, yaitu aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL), Sistem Akuntansi Satker (SAS), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), aplikasi Gaji Pemerintah Pusat (GPP), aplikasi Bendahara (SILABI dan SIMPONI) dan aplikasi persediaan (Astaw dkk., 2023).

Penelitian lain menunjukkan hasil sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satker Wilayah KPPN Poso (Sulaeman, 2023). Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain dilakukan oleh Kewo & Tanor (2020) menyatakan bahwa *Good government governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan pada SKPD Pemerintah daerah di Sulawesi Utara.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan seperti kompetensi pegawai, pengendalian internal, pengetahuan akuntansi, *Intellectual Capital*, *Good Governance*, Sistem informasi dan pemahaman akuntansi (Mardiasmo, 2020). Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada faktor *Good Government Governance*, dan Sistem informasi. Untuk mendukung lahirnya laporan keuangan yang berkualitas serta membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga kesejahteraan rakyat pun meningkat dengan dukungan teknologi informasi, Menteri Keuangan menetapkan

kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Karina *dkk.* (2023) dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan variabel. Variabel yang diteliti pada penelitian ini merupakan variabel yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu *Good Government Governance* dan menjadikan budaya organisasi sebagai pemoderasi. Budaya organisasi dimasukkan sebagai variabel moderasi karena budaya organisasi dapat memengaruhi hubungan antara *good government governance* (GGG) dan sistem informasi (SI) terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat meningkatkan efektivitas GGG dan SI dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Terdapat pula perbedaan teori yang digunakan yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan teori *stewardship* dan teori kontigensi sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Goal setting theory* serta jumlah sampel yang diteliti serta terdapat perbedaan kriteria dalam pemilihan sampel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pendahuluan, maka penulis mengidentifikasi masalah pokok yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh sistem sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis.

1. Pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh *good Government Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pengaruh budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, diantaranya adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang akuntansi sektor publik pemerintah pusat khususnya penyusunan laporan keuangan. *Good Government Governance*, Sistem informasi dan Budaya Organisasi yang merupakan objek kajian dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai dasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

1.5 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari 240 Satuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang diwakili 1 orang yang menangani pelaporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian ini.

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai kajian teoretis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V hasil penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Goal Setting Theory*

Goal setting theory atau biasa disebut teori penetapan tujuan merupakan pendekatan psikologis yang mendasari bahwa menentukan tujuan yang jelas dan lebih terperinci dapat memberikan motivasi individu untuk mencapai tujuan. *Goal setting theory* diperkenalkan Edwin A. Locke (1968) yang merupakan proses kognitif untuk mencapai tujuan yang akan menambah tingkat prestasi yang lebih tinggi jika individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Locke, 1968). Mengacu pada *Locke's model Goal setting theory* mempunyai empat mekanisme dalam memotivasi individu untuk mencapai tujuan. Pertama, penetapan tujuan dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tersebut, kedua, tujuan dapat membantu mengatur usaha yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan.

Tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan yang terstruktur berdasarkan rencana. Dengan demikian penetapan tujuan mampu meningkatkan kinerja organisasi (Arsanti, 2009). Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa perilaku seseorang diatur oleh gagasan dan harapan seseorang. Tujuan dapat diartikan sebagai target kinerja yang akan dituju oleh seseorang (Gafar, 2018)

Unsur - unsur *goal setting theory* Locke & Latham (1990), pertama *clarity* yang berarti semakin jelas orientasi tujuan saat menetapkan tujuan maka kemungkinan terjadinya ketidakpahaman dan perbedaan pemahaman oleh

bawahan akan semakin kecil. Kedua *challenge* dapat diartikan bahwa Ketika proses pencapaian tujuan menimbulkan tantangan maka akan meningkatkan motivasi pekerjanya. Ketiga yaitu *commitment* yang dapat diartikan jika seseorang tidak memiliki komitmen maka tidak akan memiliki kelanjutan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak akan berhasil. Unsur yang keempat yaitu *feedback* yang berarti untuk mencapai tujuan maka seseorang perlu umpan balik mengenai pencapaian tujuan agar seseorang mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Unsur yang terakhir adalah *task complexity* atau kompleksitas tugas mengacu pada tingkat kesulitan dari tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu Perusahaan dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu Perusahaan (Hidayat, 2018). Laporan keuangan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan sehingga laporan keuangan diharapkan bersifat netral dan tidak memihak pada kepentingan pribadi (Aprilia dkk, 2022). Laporan keuangan pemerintah menurut Safkaur *et al.*, (2019) adalah bagian penting untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan Keputusan. Tujuan laporan keuangan dapat terpenuhi jika informasi yang ada dalamnya memenuhi karakteristik kualitatif, seperti relevan (*relevance*) dan merepresentasikan secara tepat apa yang direpresentasikan (*faithful representation*). Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat dibandingkan (*comparable*), terverifikasi

(*verifiable*), tepat waktu (*timely*) dan terdapat (*understandable*).

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran yang diterima dari pajak dan sumber daya lainnya. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah nilai-nilai normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang diberikan dapat memengaruhi Keputusan pengguna laporan keuangan yang dapat memberikan evaluasi dari masa lalu, kini dan yang akan datang

2. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal jika laporan keuangan disajikan sesuai dengan wajar sehingga laporan tersebut tidak menyesatkan. Penyajian laporan keuangan yang jujur sesuai dengan peristiwa dapat diuji yang hasilnya tidak jauh berbeda jika dilakukan pengujian oleh beberapa pihak

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang disajikan dalam satu periode seharusnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain baik pihak internal maupun entitas lain yang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama selama beberapa periode.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang mudah dimengerti oleh pengguna yang mempunyai ilmu yang cukup pada kegiatan di lingkungan entitas pelaporan.

2.1.3 Good Government Governance

2.1.3.1 Pengertian Good Government Governance

Good Government sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, pelayanan yang efisien sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat (Sholohah dkk., 2019). *Good governance* meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk mengoreksi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dilaksanakan sesuai program yang telah disepakati. Keadilan merupakan keadilan dalam pelayanan dan pemanfaatan tanpa membedakan atau mengutamakan kelompok masyarakat tertentu, (Handayani dkk., 2023).

Governance harus bernilai baik dengan memiliki beberapa aspek yaitu partisipasi (*participation*) yang merupakan prinsip yang mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan hukum (*laws*) yaitu tidak memihak pada golongan tertentu, adil (*inclusivity*) artinya semua masyarakat dapat turut andil dalam Pembangunan, daya tanggap (*responsiveness*) artinya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi (*transparanty*) artinya keterbukaan mengenai proses perumusan kebijakan. Menurut Keping (2018) yaitu tata kelola bukanlah merupakan seperangkat aturan atau aktivitas tetapi merupakan sebuah proses, proses pemerintahan tidak didasarkan pada pengendalian, tetapi pada koordinasi. Tata Kelola dapat berupa kerja sama terbatas dalam suatu organisasi publik misalnya program pelatihan kerja atau

pemberdayaan masyarakat yang melibatkan banyak kebijakan (Syarifuddin & Damayanti, 2015)

United National Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut UNDP, *political governance* lebih mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*), *economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang mencerminkan pada masalah pemerataan, penurunan, kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, *administrativ governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Ada Sembilan elemen dari *Good Governance* menurut UNDP yaitu Partisipasi, Kepastian hukum, transparansi, responsive, orientasi konsensus kesetaraan efisien dan efektif, akuntabilitas, dan visi strategis, (Zai *et al.*, 2020).

Partisipasi adalah bagaimana masyarakat memiliki hak untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Aturan hukum adalah kerangka hukum yang harus dipatuhi secara utuh. Transparansi adalah dapat dengan mudah memperoleh atau mengakses informasi secara bebas. Daya tanggap yaitu melayani pihak yang berkepentingan. Berorientasi konsensus artinya berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan bertindak sebagai penengah.

Berkeadilan yaitu memiliki kesempatan yang sama. Efektifitas dan efisiensi yaitu hasil kegiatan kelembagaan harus sesuai dengan kebutuhan, berdaya guna dan berdaya hasil. Akuntabilitas artinya bertanggung jawab kepada publik atas semua kegiatan. Bervisi strategis adalah penyelenggaraan pemerintah harus memiliki sudut pandang luas dan berkelanjutan.

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, disebutkan bahwa tujuan dari *Good Governance* adalah:

1. Birokrasi yang bersih sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga terhindar dari tindakan penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Birokrasi yang bekerja secara efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Birokrasi yang bekerja transparan namun tetap mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat
5. Birokrasi yang bertanggung jawab

Adapun manfaat *Good Governace* adalah:

1. Peraturan atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah akan dipercaya dan diterapkan sehingga tercapai keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan pemerintah.
2. Partisipasi masyarakat semakin meningkat untuk ikut serta dalam pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik
3. Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih baik dan kondusif
4. Terciptanya sistem keuangan yang lebih baik dan transparan
5. Pengelolaan kebijakan dapat dijalankan lebih baik dan maksimal
6. Tidak adanya tindakan yang bersifat diskriminatif.

2.1.3.2 Indikator Good Governance

UNDP (1997) mengungkapkan indikator dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. *Participant*, masyarakat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan melalui organisasi yang ditunjuk sebagai perwakilan. Turut serta tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan menyampaikan serta ikut serta secara konstruktif.

- b. *Rule of law*, dasar hukum yang adil dan dilakukan tanpa membeda-bedakan.
- c. *Transparency*, keterbukaan mengandung arti dapat memperoleh informasi. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah.
- d. *Responsivness*, organisasi-organisasi pemerintah harus lebih cepat merespon dalam melayani masyarakat yang berkepentingan.
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kebutuhan publik secara luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat bisa memiliki peluang yang sama dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, tepat guna (efisien) dan mampu mencapai tujuan (efektif) dalam pengelolaan sumber daya.
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap kegiatan yang dilakukan.
- i. *Startegic vision*, pemerintah sebagai penyelenggara negara serta masyarakat harus memiliki rencana dan tujuan untuk masa yang akan datang.

2.1.4 Sistem Informasi

2.1.4.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan cara yang diatur untuk mengumpulkan, memasukan dan mengolah serta menyimpan data, dan cara yang diatur untuk melaporkan, mengendalikan, mengelola bahkan menyimpan informasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuan (Putri & Siptiana, 2019). Dalam landasan teori ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar teori yang berkenaan dengan pengembangan sistem informasi.

Anggareni (2017) Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Menurut Lukman (2018). Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sinergi dari semua unsur-unsur dan elemen-elemen yang ada di dalamnya, yang menunjang pelaksanaan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama dari suatu organisasi ataupun kesatuan kerja.

Romey dan Ardana (2016) menyatakan bahwa Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait yang mengumpulkan (dan mengambil kembali), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan.

2.1.4.2 Karakteristik Sistem

Menurut Sutabri (2016) “sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem”. Adapun karakteristik sistem yang dimaksud adalah:

1. Komponen Sistem (*Components*)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem.

2. Batasan Sistem (*Boundary*)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya.

3. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Batasan sistem yang memengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut.

4. Penghubung Sistem (*Interface*)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau *interface*. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain.

5. Masukan Sistem (*Input*)

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (*maintenance input*) dan sinyal (*signal input*).

6. Keluaran sistem (*Output*)

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.

7. Pengolah Sistem (*Procces*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem (*Objective*)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yangtelah direncanakan.

2.1.4.3 Klasifikasi Sistem

Menurut Tyoso (2016) "Beberapa aspek dari suatu sistem mengizinkan kita untuk mengklasifikasikan sistem yang relevan dengan sistem yang dijabarkan". Seperti berikut ini:

1. Sistem Alamiah (*Natural System*) adalah sistem yang muncul secara alamiah tanpa campur tangan manusia.
2. Sistem Tiruan (*Artifical System*) adalah sistem yang diciptakan untuk mendukung tujuan tertentu. Suatu organisasi bisnisharus memperoleh

keuntungan, tetapi ia dapat juga mengejar tujuan lainnya.

3. Sistem Deterministik (*Deterministic System*) adalah sistem yang bekerjanya dapat diramalkan sebelumnya.
4. Sistem Probabilistik (*probabilistic System*) adalah sistem yang dapat dilacak hanya dengan menggunakan nilai distribusi probabilitas selalu ada ketidakpastian nilai yang sesungguhnya pada sembarang waktu.
5. Sistem Tertutup (*Closed System*) pada sistem ini tidak terjadi pertukaran atau penggunaan sumber daya dengan atau dari lingkungannya, mengingat sistem ini tidak menggunakan input dari lingkungannya maka *output* dari sistem ini tidak bertalian dengan lingkungannya pula.
6. Sistem Terbuka (*Opened System*) adalah sistem yang menggunakan sumber daya dari lingkungannya sehingga kelurannya berkaitan dengan lingkungan juga.

2.1.4.4 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Sistem Aplikasi Sakti merupakan sebuah aplikasi bagian dari IFMIS yang digunakan secara mandatory oleh instansi/satuan kerja pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintergasi dan berbasis kinerja, (Amriani & Iskandar, 2019). Menurut Lundu & Shale (2015) penerapan IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) mencakup efektifitas, efisiensi, dan peningkatan hasil dalam proses pengelolaan keuangan.

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah penyederhanaan dari aplikasi pengelolaan keuangan negara yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja (Satker) yang menggunakan basis data terpadu (Prabowo, 2017). Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan untuk mendukung implementasi diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada lembaga pemerintah meliputi 9 modul, yaitu: Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, Modul Administrasi, serta Modul Akuntansi dan Modul Pelaporan. Aplikasi ini menggabungkan seluruh aplikasi satuan kerja pada lingkup Kementerian Keuangan, dengan adanya penggabungan dari beberapa aplikasi maka proses pengelolaan keuangan negara yang berawal dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan negara dapat dilakukan dengan mudah oleh entitas akuntansi dan pelaporan pada suatu satuan kerja secara elektronik. Ada beberapa manfaat dari penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai berikut.

1. Proses pengelolaan keuangan negara menjadi lebih mudah, aplikasi ini dapat digunakan untuk satu proses keuangan yang dilakukan oleh satu satuan kerja yang dimulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaporan serta pertanggungjawaban.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Dengan penggunaan aplikasi SAKTI satuan kerja mampu mengurangi anggaran (biaya) maupun sumber daya non keuangan (sumber daya manusia).
3. Konsolidasi data APBN yang lebih cepat. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh seluruh pengguna aplikasi dari seluruh tingkatan organisasi yang bersifat real time menyebabkan satuan kerja dapat mengakses data base yang sama

4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Aplikasi SAKTI menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan basis akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas
5. Memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Pengguna Aplikasi SAKTI pada seluruh kementerian/lembaga yang menggunakan dana APBN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sehingga pemerintah mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat.

Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan negara yang menggabungkan beberapa aplikasi pendahulunya. Aplikasi ini mempunyai beberapa perbedaan dengan aplikasi sebelumnya yang telah digunakan, Taufiqurrahman (2020). Perbedaan ini menjadikan Aplikasi Sakti lebih berdampak positif dan manfaat yang lebih baik dari aplikasi sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SAKTI menggunakan satu konsep *database* terpusat (*single database*), yaitu Sistem Aplikasi SAKTI menggunakan data yang dapat digunakan pada semua modul-modul yang dimiliki oleh Aplikasi SAKTI.
2. Tingkat keamanan yang dimiliki aplikasi SAKTI lebih terjamin jika dibandingkan dengan aplikasi pendahulunya, terdapat proses pendaftaran pengguna sesuai dengan jabatan atau wewenang sehingga hanya pengguna yang telah ter registrasi yang dapat menggunakan dan mengakses aplikasi ini serta terdapat proses mengubah teks atau data yang tidak dapat dibaca menjadi informasi yang dapat dibaca atau yang biasa disebut dengan enkripsi/deskripsi Arsip Data Komputer (ADK) sehingga data hanya dapat di baca oleh penerima dan pengirim informasi.

3. Lebih mudah dan praktis untuk digunakan (*user friendly*). Jika dibandingkan dengan aplikasi *existing* satker, SAKTI lebih praktis dan mudah untuk digunakan karena tidak perlu melakukan transfer ADK ke berbagai aplikasi lagi dan melakukan input ulang data. Sehingga dengan kemudahan ini akan dapat lebih menghemat waktu dan tenaga *user*.
4. Mampu dioperasikan dengan spesifikasi laptop/PC yang rendah (minimum) dan dapat dilakukan instalasi pada beberapa *operating system* seperti *Windows, Linux*, dll.
5. Kinerja dari aplikasi SAKTI lebih konsisten dengan minimum permasalahan.
6. Aplikasi SAKTI sebagai perwujudan konsep *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* pada sisi Pengguna Anggaran (PA) akan melengkapi modernisasi terhadap pengelolaan keuangan negara yang merupakan salah satu bagian dari rencana menuju pemerintahan digital.

Gambar 2. 1 Modul pada SAKTI dibanding Menu pada Aplikasi Eksisting



Sumber : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Gambar di atas merupakan bagan yang menjelaskan jika modul-modul yang terdapat dalam SAKTI merupakan pengembangan dari aplikasi *existing* satker sebelumnya. Berdasarkan PMK nomor 159/PMK.05/2018 tentang

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, SAKTI memiliki 9 modul, yang meliputi:

1. Modul Penganggaran

Modul penganggaran adalah modul yang melakukan proses penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), penyusunan anggaran berupa Kertas Kerja atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKAKL/DIPA), Standar Struktur Biaya, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Rencana Penarikan Dana, Rencana penerimaan Dana, dan Revisi Anggaran dan Reviu Revisi Anggaran. Modul Penganggaran merupakan pengembangan dari aplikasi existing satker, yaitu Aplikasi RKAKL/DIPA. Modul ini akan menghasilkan output berupa ADK RKA-KL

2. Modul Komitmen

Modul Komitmen merupakan modul adaptasi dari Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker). Modul ini berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas terkait pengelolaan data *supplier* dan kontrak, pengelolaan data *supplier* yang meliputi aktivitas pembuatan dan pendaftaran, perubahan, dan penonaktifan *supplier*, serta proses pengelolaan data kontrak yang meliputi pembuatan dan pendaftaran, perubahan, dan pembatalan data kontrak. Output yang akan dihasilkan dari proses tersebut adalah ADK *Supplier*, ADK Kontrak, Data BAST (Berita Acara Serah Terima), dan Data Capaian Output.

3. Modul Pembayaran

Modul penganggaran adalah modul yang melakukan proses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar

(SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Yang akan menghasilkan output berupa dokumen Renkas, SPBy, PPDH, SPP, SPM atau yang dipersamakan, serta ADK (ADK RT (Resume Tagihan), ADK SPM atau yang dipersamakan). Modul ini merupakan adaptasi dari aplikasi existing satker, yaitu Aplikasi SAS.

4. Modul Bendahara

Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya melakukan perekaman, perubahan, dan penghapusan data transaksi bendahara yang meliputi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang akan menghasilkan output berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara. Modul ini merupakan adaptasi dari menu SiLaBI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) dalam Aplikasi SAS. Fitur di dalam modul ini meliputi.

- a) Penatausahaan Langsung (LS) Bendahara
- b) Penatausahaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- c) Penatausahaan potongan/pungutan pajak
- d) Penatausahaan Surat Bukti Setoran Pendapatan dan Pengembalian Belanja
- e) Transaksi lain yang dikelola oleh bendahara.

5. Modul Persediaan

Modul Persediaan merupakan modul hasil pengembangan dari Aplikasi Persediaan. Modul Persediaan merupakan modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB). Metode pencatatan dalam Modul Persediaan adalah dengan menggunakan

metode perpetual, sedangkan metode penilaian yang digunakan meliputi metode harga perolehan/satuan terakhir, metode harga rata-rata tertimbang (*weighted average*) dan metode FIFO (*First In First Out*). Output yang dihasilkan dari modul ini adalah Laporan Persediaan.

6. Modul Aset Tetap

Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya. Modul Aset Tetap merupakan modul hasil adaptasi dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Modul ini memiliki output berupa Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, dan Laporan Penyusutan.

7. Modul Piutang

Modul Piutang adalah bagian dari SAKTI yang fungsinya adalah untuk menatausahakan dan mengelola data terkait piutang yang ada pada satker user SAKTI. Jenis transaksi piutang yang dimaksud meliputi: transaksi piutang PNBPN, transaksi piutang tagihan penjualan angsuran, dan transaksi piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Modul ini memiliki output berupa Kartu Piutang. Modul ini merupakan modul baru yang baru diaplikasikan dalam SAKTI sebagai bentuk inovasi Kementerian Keuangan dalam aplikasi pengelolaan keuangan negara.

8. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah bagian dari SAKTI yang fungsinya berkaitan dengan keseluruhan proses akuntansi dan pelaporan seperti

pengintegrasian data jurnal dari seluruh penjumlahan yang ada pada masing-masing modul SAKTI guna keperluan penyusunan Laporan Keuangan. Ruang lingkup dari modul tersebut, antara lain sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait, sistem pelaporan manajerial (statistik), dan sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan. Modul ini merupakan pengembangan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Modul Akuntansi dan Modul Pelaporan akan menghasilkan output berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.1.4.5 Indikator Sistem Informasi

Menurut Susanto (2017), indikator sistem informasi akuntansi yang baik antara lain yaitu sebagai berikut.

1. Akurat, maksudnya informasi tersebut harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pada hal ini biasanya dilakukan pengujian melalui dua orang atau lebih yang berbeda dan jika hasilnya menunjukkan hasil yang sama maka data tersebut telah dianggap akurat.
2. Tepat waktu, maksudnya informasi tersebut harus tersedia di saat diperlukan.
3. Relevan, maksudnya informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi di berbagai bagian dan tingkatan dalam organisasi tersebut.
4. Lengkap, maksudnya informasi yang diberikan harus lengkap sesuai dengan kenyataan

Sedangkan menurut Triyani (2018), ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sistem informasi yaitu.

1. Kualitas sistem artinya karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi. Misalnya: kemudahan penggunaan, sistemfleksibilitas, keandalan

sistem, dan kemudahan belajar, serta fitur sistem intuitif, kecanggihan, fleksibilitas, dan waktu respon.

2. Kualitas informasi artinya karakteristik yang diinginkan dari sistem output; yaitu, laporan manajemen dan halaman Web. Sebagai contoh: relevansi, dimengerti, akurasi, keringkasan, kelengkapan, dimengerti, mata uang, ketepatan waktu, dan kegunaan.
3. Kualitas layanan artinya kualitas dukungan yang pengguna sistem terima dari departemen IS dan IT mendukung personalia. Sebagai contoh: respon, akurasi, keandalan, kompetensi teknis, dan empati dari staf personalia

2.1.5 Budaya Organisasi

2.1.5.1 Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sebagai nilai-nilai, asumsi, norma, kepercayaan, falsafah, dan kebiasaan organisasi yang dikembangkan oleh pendirinya dengan membutuhkan waktu yang cukup lama, yang disosialisasikan kepada anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan di dalam aktivitas organisasi sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir, perilaku dan sikap anggota organisasi dalam melakukan produksi dan melayani konsumennya untuk mencapai tujuan organisasi (Wan Dedi Wahyudi, 2019). Menurut Arifin (2012) budaya organisasi merupakan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), ataupun norma-norma yang sudah berlaku sejak lama dan sudah disepakati serta diikuti oleh anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi.

Menurut Haryono (2013) budaya organisasi merupakan sistem yang dipercayai dan nilai yang ada di organisasi dikembangkan agar dapat menuntun perilaku individu maupun kelompok organisasi itu sendiri. Menurut Robbins &

Judge (2015) budaya organisasi memiliki sistem makna bersama yang dianut oleh setiap anggota organisasi yang dapat membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama bila dipahami dengan seksama merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu.

Menurut Puspita (2020) menyatakan budaya organisasi atau organizational culture merupakan sehimunan nilai, prinsip, tradisi dan cara bekerja yang dianut bersama oleh anggota perusahaan serta memengaruhi perilaku tindakan karyawan perusahaan. Dalam kebanyakan perusahaan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang dianut bersama ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan benar-benar sangat memengaruhi bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Budaya organisasi menjadi identitas atau karakter perusahaan yang dipertahankan. Suatu budaya yang kuat merupakan kebiasaan yang bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih baik.

2.1.5.2 Indikator Budaya Organisasi

Terdapat tujuh karakteristik primer yang berisi hakikat dari suatu budaya organisasi yang dikenal sebagai indikator budaya organisasi (Robbins, 2015) yaitu:

1. Inovasi dan pengambilan risiko, berarti sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko.
2. Perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail.
3. Orientasi hasil, yang berarti sejauh mana manajemen berfokus pada hasil yang akan dicapai bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

4. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu.
5. Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, ukurannya individu.
6. Keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan.
7. Stabilitas yaitu organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah pemaparan hasil penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Cecilia Lelly Kewo, Linda A.O. Tanor (2020)	Apakah <i>Good Governmen Governance</i> dan pengendalian intern dapat memengaruhi kualitas akuntabilitas laporan keuangan sektor publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Good government governance</i> berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sektor publik. 2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sektor publik.
2	Tiara Sabrina, Zuhri (2023)	Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus di PTN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SAKTI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di enam PTNP pada Kemenparekraf/Baparekraf, artinya apabila semakin baik penerapan aplikasi SAKTI di enam PTNP maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. 2. Kompetensi sumber daya manusia di enam PTNP pada kemenparekraf/ Baparekraf berpengaruh

			secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, artinya apabila semakin baik tingkat kompetensi sumber daya manusia di enam PTNP maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3	Fatima Aszara Stirilita, Andayani (2022)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota 2. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota
4	Desi Dwi Rachmawati, Sri Anik	pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, <i>good governance</i> dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada organisasi pemerintah daerah kabupaten Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Semarang, maka semakin tinggi penerapan SAP akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 2. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 3. <i>Good governance</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa <i>good governance</i> memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam kualitas laporan keuangan

			4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Semarang. Artinya semakin besar pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan
5	Rosiatul Aminy, Endaar Pituringsih, Erna Widiastuty (2021)	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Komisi Pemilihan umum se Nusa Tenggara Barat)	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Komisi Pemilihan umum se Nusa Tenggara Barat)
6	Ferra Pratiwi Zai, Sahala Purba, Arison Nainggolan (2020)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governement Governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan	1. Penerapan <i>good government governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
7	Neneg Sri Suprihatin, Arinda Ayu Ananthy (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Informasi Akuntansi dan standar akuntansi pemerintah berhubungan positif dengan laporan keuangan
8	Suleman (2023)	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan kualitas sumber daya	Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini

		manusia sebagai variabel moderasi	memperkuat pengaruh sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
9	Rieni Karina (2023)	Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada Kementerian PUPR dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai pemoderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kementerian PUPR. 2. Pemanfaatan teknologi informasi yang terdiri dari: perangkat, pengelolaan data keuangan, dan pemeliharaan dapat memoderasi secara positif Interaksi variable 3. Interaksi kompetensi SDM dengan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laporan keuangan
10	Siti Hasanah, Tapi Rumondang Siregar (2021)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
11	Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso (2019)	Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-faktor yang memengaruhinya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun penerapan <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Reformasi Pemerintah Daerah,

			Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
12	Silka Gusdian, Tertiaro Wahyudi, Hasni Yusrianti, (2024)	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai, Dan Intensitas Pemakaian Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai, Dan Intensitas Pemakaian Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Sedangkan Budaya Organisasi Tidak Dapat Memoderasi Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai, Dan Intensitas Pemakaian Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Implikasi Dari Penelitian Ini Adalah Dapat Memberikan Manfaat Praktis Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang. Implikasi Lainnya Adalah Mendukung Teori Reason Action Dalam Studi.
13	Ni Made Vita Indriyani Dan I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra, (2020)	Pengaruh Good Government Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi Pada Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan Hasil Analisis, Disimpulkan Bahwa H1 Diterima. Hal Ini Berarti Good Government Governance Berpengaruh Positif Signifikan Pada Kualitas Laporan Keuangan. H2 Juga Diterima Yang Berarti Budaya Thk Memperkuat Pengaruh Good Government Governance Pada Kualitas Laporan Keuangan.
14	Ni Kd Sioaji Yamawati Dan I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi (2020)	Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Kualitas Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Gianyar Dengan Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Sebagai Pemoderasi	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Pada Kinerja Karyawan. Selanjutnya Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Mampu Memoderasi Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Kualitas Laporan Keuangan